



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA, SE, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUAR

Jabatan : Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Februari 2022

GUBERNUR RIAU

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

  
SYAMSUAR

  
INDRA, SE, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721115 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI RIAU**

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	13,68%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%


<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.976.664.420	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.957.113.982.607	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.501.826.781	
	<b>Total</b>	<b>1.990.592.473.808</b>	

Pekanbaru, Februari 2022

9. GUBERNUR RIAU 

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

  
SYAMSUAR

  
**INDRA, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721115 199803 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA, SE, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUAR

Jabatan : Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Februari 2022

GUBERNUR RIAU

**SYAMSUAR**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

**INDRA, SE, M.Si.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721115 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI RIAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	13,68%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.976.664.420	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.957.113.982.607	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.501.826.781	
	<b>Total</b>	<b>1.990.592.473.808</b>	


Pekanbaru, Februari 2022

GUBERNUR RIAU



**SYAMSUAR**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH



**INDRA, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721115 199803 1 004